MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: PEN/ I /X/LOG.3.6./2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
TERKAIT DENGAN ALAT MATERIAL KHUSUS (ALMATSUS) POLRI
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa infomasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;

b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

8. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 tentang tata cara pelayanan informasi publik di Lingkungan Polri;

10. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2011 tentang perubahan peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 tentang tata cara pelayanan informasi publik di Lingkungan Polri;

11. Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2015 tentang pedoman dan tata cara pengadaan alat material khusus di lingkungan Polri;

12. Peraturan Kadiv Humas polri No. 1 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengujian Konsekuensi Terhadap Informasi Yang Dikecualikan Untuk Dipublikasikan;

13. Keputusan Kapolri Nomor: Kep/464/VI/2014 tentang pengkategorian peralatan material khusus (Almatsus) Polri;

14. Keputusan Kapolri Nomor: Kep/427/II/2021 tentang blueprint peralatan material khusus (Almatsus) Polri tahun 2020-2024.

Memperhatikan: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 251 tanggal 12 Oktober Tahun 2023.

MEMUTUSKAN .....

PENETAPAN PPID POLRI
NOMOR : PEN/ 1 /X/LOG.3.6./2023
TANGGAL: 27 OKTOBER 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TERKAIT DENGAN ALAT MATERIAL KHUSUS (ALMATSUS) POLRI PADA LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

1. Daftar informasi sebagaimana yang terlampir dalam lampiran surat Penetapan ini merupakan informasi yang dikecualikan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah melalui Uji Konsekuensi yang telah dilaksanakan pada Tanggal 12 bulan Oktober Tahun 2023;

2. Lembar pengujian konsekuensi Nomor 251 tanggal 12 Oktober tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran surat Penetapan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

3. hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusah tersendiri;

4. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 27 Oktober 2023

KEPALA BIRO PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SELAKU PPID POLRI

Drs. MOH. HENDRA SUHARTIYONO, M.Si.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Mengetahui,
KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT POLRI
SELAKU ATASAN PPID POLRI

Dr. SANDI NUGROHO, S.I.K., S.H., M.Hum.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT

LAMPIRAN PENETAPAN PPID POLRI
NOMOR : PEN/ 1 /LOG.3.6./X/2023
TANGGAL: 27 OKTOBER 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
TERKAIT DENGAN ALAT MATERIAL KHUSUS (ALMATSUS) POLRI
Nomor: BA/ 251 /X/2023/Divhumas

Pada hari ini Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 bertempat di Ruang Dirgantara Lantai 2 Hotel Ambhara Jalan Melawai Raya No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik yang terkait dengan alat material khusus (Almatsus) Polri sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Informasi dan dokumentasi perencanaan kebutuhan alat material khusus (almatsus) Polri.	- Pasal 17 huruf c angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 17 huruf c angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Perkap No 10 tahun 2015 tentang pedoman dan tatacara pengadaan alat material khusus di lingkungan Polri. - Kep/464/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang pengkategorian peralatan material khusus (Almatsus) Polri.	- Dapat mengungkap informasi rahasia tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Dapat mengungkap dokumen rahasia	- Menjaga kerahasiaan strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi.	30 Tahun

LAMPIRAN PENETAPAN PPID POLRI
NOMOR : PEN/ / /LOG.3.6./X/2023
TANGGAL: 27 OKTOBER 2023

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi.	- Menjaga dokumen rahasia yang memuat tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi.	
2	Informasi dan dokumentasi pengadaan alat material khusus (almatsus) Polri. Antara lain : a. Administrasi pengadaan (dokumen lelang, dokumen kontrak, dokumen pengadaan,	- Pasal 17 huruf c angka 1 UU No 14 Tahun 2008. - Pasal 17 huruf c angka 2 UU No 14 Tahun 2008. - Pasal 17 huruf b UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP - Perkap No 10 tahun 2015	- Dapat mengungkap informasi rahasia tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara	- Menjaga kerahasiaan strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan	30 Tahun

LAMPIRAN PENETAPAN PPID POLRI
NOMOR : PEN/ 1 /LOG.3.6./X/2023
TANGGAL: 27 OKTOBER 2023

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
	dokumen pembayaran, dokumen pendistribusian, dll) b. Identitas personel pengadaan (identitas pribadi yang dirahasiakan, dll) c. Identitas barang (spesifikasi teknis, analisa harga, data pendukung lainnya, merk, harga barang, dll)	tentang pedoman dan tatacara pengadaan alat material khusus di lingkungan Polri. - Kep/464/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang pengkategorian peralatan material khusus (Almatsus) Polri. - Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara.	yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Dapat mengungkap dokumen rahasia tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dari persaingan usaha	negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Menjaga dokumen rahasia yang memuat tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - melindungi kepentingan perlindungan hak	

LAMPIRAN PENETAPAN PPID POLRI
NOMOR : PEN/ 1 /LOG.3.6./X/2023
TANGGAL: 27 OKTOBER 2023

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			tidak sehat. - dapat mengungkap identitas pribadi personel pengadaan almatsus Polri.	atas kekayaan intelektual (HAKI) dari persaingan usaha tidak sehat. - melindungi identitas pribadi personel pengadaan almatsus Polri.	
3	Informasi dan dokumentasi penganggaran alat material khusus (almatsus) Polri.	- Pasal 17 huruf c angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 17 huruf c angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Perkap No 10 tahun 2015 tentang pedoman dan tatacara pengadaan alat material khusus di lingkungan Polri. - Kep/464/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang pengkategorian peralatan material khusus (Almatsus) Polri.	- Dapat mengungkap informasi rahasia tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Dapat mengungkap dokumen rahasia tentang strategi,	- Menjaga kerahasiaan strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Menjaga dokumen rahasia yang	30 Tahun

LAMPIRAN PENETAPAN PPID POLRI
NOMOR : PEN/ I /LOG.3.6./X/2023
TANGGAL: 21 OKTOBER 2023

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi.	memuat tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi.	
4	Informasi dan dokumentasi pemanfaatan alat material khusus (almatsus) Polri yang digunakan dalam pemeliharaan keamanan, penertiban masyarakat dan penegakan hukum.	- Pasal 17 huruf c angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 17 huruf c angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 17 huruf a angka 5 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Perkap No 10 tahun 2015 tentang pedoman dan	- Dapat mengungkap informasi rahasia tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan,	- Menjaga kerahasiaan strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap	30 Tahun.

LAMPIRAN PENETAPAN PPID POLRI
NOMOR : PEN/ 1 /LOG.3.6./X/2023
TANGGAL: 27 OKTOBER 2023

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		tatacara pengadaan alat material khusus di lingkungan Polri. - Kep/464/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang pengkategorian peralatan material khusus (Almatsus) Polri.	pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Dapat mengungkap dokumen rahasia tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.	perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Menjaga dokumen rahasia yang memuat tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Melindungi keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.	

LAMPIRAN PENETAPAN PPID POLRI
NOMOR : PEN/ 1 /LOG.3.6./X/2023
TANGGAL: 27 OKTOBER 2023

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
5	Informasi dan dokumentasi pengamanan dan pemeliharaan alat material khusus (almatsus) Polri.	- Pasal 17 huruf c angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 17 huruf c angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 17 huruf a angka 5 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Perkap No 10 tahun 2015 tentang pedoman dan tatacara pengadaan alat material khusus di lingkungan Polri. - Kep/464/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang pengkategorian peralatan material khusus (Almatsus) Polri.	- Dapat mengungkap informasi rahasia tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Dapat mengungkap dokumen rahasia tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan,	- Menjaga kerahasiaan strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Menjaga dokumen rahasia yang memuat tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan	30 tahun

LAMPIRAN PENETAPAN PPID POLRI
NOMOR : PEN/ 1 /LOG.3.6./X/2023
TANGGAL: 27 OKTOBER 2023

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.	negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Melindungi keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.	
6	Informasi dan dokumentasi penilaian alat material khusus (almatsus) Polri.	- Pasal 17 huruf c angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 17 huruf c angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Kep/464/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang pengkategorian peralatan material khusus (Almatsus) Polri.	- Dapat mengungkap informasi rahasia tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi.	- Menjaga kerahasiaan strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau	30 tahun

LAMPIRAN PENETAPAN PPID POLRI
NOMOR : PEN/ 1 /LOG.3.6./X/2023
TANGGAL: 27 OKTOBER 2023

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			- Dapat mengungkap dokumen rahasia tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi.	evaluasi. - Menjaga dokumen rahasia yang memuat tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi.	
7	Informasi dan dokumentasi pemusnahan alat material khusus (almatsus) Polri.	- Pasal 17 huruf c angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 17 huruf c angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Kep/464/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang	- Dapat mengungkap informasi rahasia tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan	- Menjaga kerahasiaan strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan	30 tahun

LAMPIRAN PENETAPAN PPID POLRI
NOMOR : PEN/ / /LOG.3.6./X/2023
TANGGAL: 27 OKTOBER 2023

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		pengkategorian peralatan material khusus (Almatsus) Polri.	dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Dapat mengungkap dokumen rahasia tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi.	dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Menjaga dokumen rahasia yang memuat tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi.	

LAMPIRAN PENETAPAN PPID POLRI
NOMOR : PEN/ / /LOG.3.6./X/2023
TANGGAL: 27 OKTOBER 2023

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
8	Informasi dan dokumentasi penghapusan alat material khusus (almatsus) Polri.	- Pasal 17 huruf c angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 17 huruf c angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Kep/464/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang pengkategorian peralatan material khusus (Almatsus) Polri. - Keputusan Kapolri Nomor : Kep/838/IV/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Kapolri kepada Aslog Kapolri, dst.	- Dapat mengungkap informasi rahasia tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Dapat mengungkap dokumen rahasia tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan,	- Menjaga kerahasiaan strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Menjaga dokumen rahasia tentang memuat tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan	30 tahun

LAMPIRAN PENETAPAN PPID POLRI
NOMOR : PEN/ / /LOG.3.6./X/2023
TANGGAL: 27 OKTOBER 2023

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi.	negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi.	
9	Informasi dan dokumentasi pendistribusian dan pemindah tanganan alat material khusus (almatsus) Polri.	- Pasal 17 huruf c angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 17 huruf c angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 17 huruf c angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Kep/464/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang pengkategorian peralatan material khusus (Almatsus) Polri. - Keputusan Kapolri Nomor : Kep/838/IV/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Kapolri kepada	- Dapat mengungkap informasi rahasia tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Dapat mengungkap dokumen rahasia tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang	- Menjaga kerahasiaan strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Menjaga dokumen rahasia yang memuat tentang strategi, Intelijen,	30 tahun

LAMPIRAN PENETAPAN PPID POLRI
NOMOR : PEN/ 1 /LOG.3.6./X/2023
TANGGAL: 27 OKTOBER 2023

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		Aslog Kapolri, dst.	berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Dapat mengungkapkan informasi tentang jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem keamanan negara serta rencana pengembangannya.	Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Melindungi informasi tentang jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem keamanan negara serta rencana pengembangannya.	

LAMPIRAN PENETAPAN PPID POLRI
NOMOR : PEN/ / /LOG.3.6./X/2023
TANGGAL: 27 OKTOBER 2023

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
10	Informasi dan dokumentasi penatausahaan alat material khusus (almatsus) Polri.	- Pasal 17 huruf c angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 17 huruf c angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Kep/464/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang pengkategorian peralatan material khusus (Almatsus) Polri. - Pasal 17 huruf c angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP.	- Dapat mengungkap informasi rahasia tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Dapat mengungkap dokumen rahasia tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan,	- Menjaga kerahasiaan strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Menjaga dokumen rahasia yang memuat tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan	30 tahun

LAMPIRAN PENETAPAN PPID POLRI
NOMOR : PEN/ / /LOG.3.6./X/2023
TANGGAL: 27 OKTOBER 2023

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Dapat mengungkapkan informasi tentang jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem keamanan negara serta rencana pengembangannya.	negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi.	
11	Informasi dan dokumentasi pengawasan alat material khusus (almatsus) Polri.	- Pasal 17 huruf c angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 17 huruf c angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Perkap No 10 tahun 2015 tentang pedoman dan tatacara pengadaan alat material khusus di	- Dapat mengungkap informasi rahasia tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi	- Menjaga kerahasiaan strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang	30 tahun

LAMPIRAN PENETAPAN PPID POLRI
NOMOR : PEN/ / /LOG.3.6./X/2023
TANGGAL: 27 OKTOBER 2023

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		lingkungan Polri. - Kep/464/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang pengkategorian peralatan material khusus (Almatsus) Polri.	tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Dapat mengungkap dokumen rahasia tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi.	meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Menjaga dokumen rahasia yang memuat tentang strategi, Intelijen, Operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Melindungi informasi tentang jumlah, komposisi, disposisi, atau	

LAMPIRAN PENETAPAN PPID POLRI
NOMOR : PEN/ / /LOG.3.6./X/2023
TANGGAL: 27 OKTOBER 2023

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
				dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem keamanan negara serta rencana pengembangannya.	

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 27 Oktober 2023

KARO PID DIVHUMAS POLRI
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI POLRI

Drs. MOH. HENDRA SUHARTIYONO, M.Si.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

LAMPIRAN KETETAPAN PPID POLRI
NOMOR : KET/ /X/LOG.3.6./2023
TANGGAL: OKTOBER 2023

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP. Iroth Laurens Recky, S.I.K.	Kabag Anev Ro PID Divhumas Polri	Divhumas Polri	
2	KBP. Dr. Leganek Mawardi, S.H., S.I.K., M.Si.	Kabag Invent Biro Pal Slog Polri	Slog Polri	
3	AKBP Siti Zubaidah, S.H., M.H.	Kasubbag Rapbidham Bagrapkum Robankum Divkum Polri	Divkum Polri	
4	AKBP Ida Ayu Kade Someyani, S.I.K.	Kasubbag Tuduan Bagdumas Itwasum Polri	Itwasum Polri	
5	AKBP Wiwing Bundari, SH, M.Si.	Kasubbag Sismet Bag Binfung Ro Renmin	Baintelkam Polri	
6	AKBP M. Kunto Wibisono, S.I.K, M.Si.	Kasubbag Sumda Puskeu Polri	Puskeu Polri	
7	AKBP Deddy Iskandar	Kasubbag Sismet Binfung Baharkam Polri	Baharkam Polri	
8	AKBP Aruma Chandra Dewi, S.I.K, M.Krim.	Kasubbag Jian Info Bag Infotek Lemdiklat Polri	Lemdiklat Polri	
9	AKBP Yoseph Helena Tena Bay, S.Sos, M.A.P	Kasubbag Log Bagsumda Ro Renmin Bareskrim Polri	Bareskrim Polri	
10	Kompol Romatua Luter Siregar	Paur Subbaghumas Bagops Korbrimob Polri	Korbrimob Polri	

LAMPIRAN KETETAPAN PPID POLRI
NOMOR :KET / /LOG.3.6./X/2023
TANGGAL: OKTOBER 2023

No	Nama	Jabatan	Satker	Tanda Tangan
11	Kompol Yul Kuswoyo, S.H	Paur I Subbag Binfung Densus 88 AT Polri	Densus 88 AT Polri	
12	Kompol Yuli Sulistyowati, S.H	Kasubbag Intranet Bagsituspol Rotekinfo Divtik Polri	Divtik Polri	
13	Kompol Brahma Aditya, S.I.K	Ka Taud Slog Polri	Slog Polri	
14	Kompol Dian. N	P.S Kasubbagbinfung Srena Polri	Srena Polri	
15	Ipda Imam Agus	Bagops Anev Korlantas Polri	Korlantas Polri	
16	Pembina Budi Hartanto, SE, M.M.	Paurlog Subbag Sumda Bagrenmin SSDM Polri	SSDM Polri	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Jakarta, 27 Oktober 2023

KARO PID DIVHUMAS POLRI
SELAKU PPID KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. MOH. HENDRA SUHARTIYONO, M.Si.
BRIGADIR JENDERAL POLISI